

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : B/001/PANREKKPK/09/2023**  
**TENTANG**  
**REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**  
**TAHUN 2023/2024**

Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk dapat bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di unit kerja Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut:

**I. UNIT PENEMPATAN ESELON II:**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Biro Hukum  | : 3 formasi  |
| 2. Direktorat Jejaring Pendidikan                                    | : 15 formasi |
| 3. Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat                       | : 9 formasi  |
| 4. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi                   | : 10 formasi |
| 5. Sekretariat Deputy Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat   | : 38 formasi |
| 6. Direktorat Monitoring   | : 4 formasi  |
| 7. Direktorat Antikorupsi Badan Usaha                                | : 3 formasi  |
| 8. Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi | : 33 formasi |
| 9. Sekretariat Deputy Bidang Penindakan dan Eksekusi                 | : 37 formasi |
| 10. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I                    | : 4 formasi  |
| 11. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II                   | : 4 formasi  |
| 12. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III                  | : 4 formasi  |
| 13. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV                   | : 5 formasi  |
| 14. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V                    | : 4 formasi  |
| 15. Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi dan Supervisi               | : 26 formasi |
| 16. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi    | : 1 formasi  |
| 17. Sekretariat Deputy Bidang Informasi dan Data                     | : 3 formasi  |
| 18. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi                | : 5 formasi  |
| 19. Sekretariat Dewan Pengawas                                       | : 6 formasi  |

**II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JENIS FORMASI**

Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan pegawai dengan jumlah total 214 formasi sebagai berikut:

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI FORMASI		
				Umum	Khusus "Dengan Pujian"/ Cumlaude	Khusus Putra/i Papua/ Papua Barat
1.	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 MANAJEMEN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN;S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN;S-1 PENDIDIKAN MASYARAKAT;S-1 MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI;S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL;S-1 PSIKOLOGI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DIREKTORAT JEJARING PENDIDIKAN	13	2	0
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN ;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SOSIOLOGI;S-1 PSIKOLOGI;S-1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DIREKTORAT PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT	8	1	0

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI FORMASI		
				Umum	Khusus "Dengan Pujian"/ Cumlaude	Khusus Putra/i Papua/ Papua Barat
		MANAJEMEN INFORMATIKA				
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 PSIKOLOGI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN;S-1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN;S-1 PENDIDIKAN MASYARAKAT;S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL;S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI;S-1 STATISTIKA	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT, DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTIKORUPSI	8	2	0
4.	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 ILMU SOSIAL;S-1 KRIMINOLOGI;S-1 ILMU POLITIK;S-1 EKONOMI;S-1 MANAJEMEN;S-1 AKUNTANSI	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING, DIREKTORAT MONITORING	2	2	0
5.	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 EKONOMI;S-1 AKUNTANSI;S-1 MANAJEMEN	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN MONITORING, DIREKTORAT ANTIKORUPSI BADAN USAHA	2	1	0
6.	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 EKONOMI; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ;S-1 STUDI PEMBANGUNAN ;S-1 AKUNTANSI; S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 KEBIJAKAN PUBLIK; S-1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG KOORDINASI DAN SUPERVISI, DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI WILAYAH I	1	1	0

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI FORMASI		
				Umum	Khusus "Dengan Pujian"/ <i>Cumlaude</i>	Khusus Putra/i Papua/ Papua Barat
		HUKUM; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK; S-1 ADMINISTRASI NEGARA; S-1 PERENCANAAN WILAYAH; S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH; S-1 SISTEM INFORMASI				
7.	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 STUDI PEMBANGUNAN ;S-1 AKUNTANSI;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 ILMU PEMERINTAHAN ;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH;S-1 PERENCANAAN WILAYAH;S-1 SISTEM INFORMASI	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG KOORDINASI DAN SUPERVISI, DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI WILAYAH II	1	1	0
8.	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG KOORDINASI DAN SUPERVISI, DIREKTORAT	1	1	0

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI FORMASI		
				Umum	Khusus "Dengan Pujian"/ <i>Cumlaude</i>	Khusus Putra/i Papua/ Papua Barat
		STUDI PEMBANGUNAN ;S-1 AKUNTANSI;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 ILMU PEMERINTAHAN ;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH;S-1 PERENCANAAN WILAYAH	KOORDINASI DAN SUPERVISI WILAYAH III			
9.	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 STUDI PEMBANGUNAN ;S-1 AKUNTANSI;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 ILMU PEMERINTAHAN ;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH;S-1 PERENCANAAN WILAYAH	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG KOORDINASI DAN SUPERVISI, DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI WILAYAH IV	2	1	0

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI FORMASI		
				Umum	Khusus "Dengan Pujian"/ Cumlaude	Khusus Putra/i Papua/ Papua Barat
10.	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 STUDI PEMBANGUNAN ;S-1 AKUNTANSI;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 ILMU PEMERINTAHAN ;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH;S-1 PERENCANAAN WILAYAH	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG KOORDINASI DAN SUPERVISI, DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI WILAYAH V	1	0	1
11.	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL;S-1 HUKUM;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 ILMU POLITIK;S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI;S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA, DIREKTORAT PEMBINAAN JARINGAN KERJA ANTAR KOMISI DAN INSTANSI	1	0	0
12.	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK	S-1 MANAJEMEN	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, PUSAT PERENCANAAN STRATEGIS	1	1	0

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI FORMASI		
				Umum	Khusus "Dengan Pujian"/ Cumlaude	Khusus Putra/i Papua/ Papua Barat
	PIDANA KORUPSI		PEMBERANTASAN KORUPSI			
13.	AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 EKONOMI;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN; S-1 HUKUM	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS	5	1	0
14.	AHLI PERTAMA - PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 HUKUM	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, BIRO HUKUM	2	1	0
15.	AHLI PERTAMA - PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 HUKUM;S-1 EKONOMI	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG PENINDAKAN DAN EKSEKUSI, DIREKTORAT PELACAKAN ASET, PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN EKSEKUSI	26	6	1
16.	AHLI PERTAMA - PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 EKONOMI;S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 HUKUM;S-1 STUDI PEMBANGUNAN ;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ;S-1 AKUNTANSI;S-1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG KOORDINASI DAN SUPERVISI, DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI WILAYAH I	2	0	0

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI FORMASI		
				Umum	Khusus "Dengan Pujian"/ <i>Cumlaude</i>	Khusus Putra/i Papua/ Papua Barat
		ILMU PEMERINTAHAN ;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH;S-1 PERENCANAAN WILAYAH;S-1 HUMANIORA;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 ILMU POLITIK;S-1 TEKNIK INFORMATIKA				
17.	AHLI PERTAMA - PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 EKONOMI;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 STUDI PEMBANGUNAN ;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 ILMU PEMERINTAHAN ;S-1 HUKUM;S-1 AKUNTANSI;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 PERENCANAAN WILAYAH;S-1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG KOORDINASI DAN SUPERVISI, DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI WILAYAH II	2	0	0



NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI FORMASI		
				Umum	Khusus "Dengan Pujian"/ <i>Cumlaude</i>	Khusus Putra/i Papua/ Papua Barat
		HUMANIORA;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 ILMU POLITIK;S-1 TEKNIK INFORMATIKA				
18.	AHLI PERTAMA - PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 EKONOMI;S-1 STUDI PEMBANGUNAN ;S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 HUKUM;S-1 AKUNTANSI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU PEMERINTAHAN ;S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH;S-1 PERENCANAAN WILAYAH;S-1 HUMANIORA;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 ILMU POLITIK;S-1 TEKNIK INFORMATIKA	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG KOORDINASI DAN SUPERVISI, DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI WILAYAH III	2	0	0
19.	AHLI PERTAMA -	S-1 EKONOMI;S-1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI	2	0	0

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI FORMASI		
				Umum	Khusus "Dengan Pujian"/ <i>Cumlaude</i>	Khusus Putra/i Papua/ Papua Barat
	PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI	HUKUM;S-1 STUDI PEMBANGUNAN ;S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 AKUNTANSI;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ;S-1 ILMU PEMERINTAHAN ;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 PERENCANAAN WILAYAH;S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH;S-1 HUMANIORA;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 ILMU POLITIK;S-1 TEKNIK INFORMATIKA	PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG KOORDINASI DAN SUPERVISI, DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI WILAYAH IV			
20.	AHLI PERTAMA - PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI	S-1 EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 ILMU PEMERINTAHAN ;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG KOORDINASI DAN SUPERVISI, DIREKTORAT KOORDINASI DAN SUPERVISI WILAYAH V	2	0	0

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI FORMASI		
				Umum	Khusus "Dengan Pujian"/ <i>Cumlaude</i>	Khusus Putra/i Papua/ Papua Barat
		PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 STUDI PEMBANGUNAN ;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 PEMBANGUNAN WILAYAH;S-1 PERENCANAAN WILAYAH;S-1 HUMANIORA;S-1 ILMU SOSIAL;S-1 ILMU POLITIK;S-1 TEKNIK INFORMATIKA				
21.	TERAMPIL - PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	D-III SEMUA JURUSAN	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT, SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	38	0	0
22.	TERAMPIL - PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	D-III SEMUA JURUSAN	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG PENINDAKAN DAN EKSEKUSI, SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENINDAKAN DAN EKSEKUSI	37	0	0

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	UNIT PENEMPATAN	ALOKASI FORMASI		
				Umum	Khusus "Dengan Pujian"/ <i>Cumlaude</i>	Khusus Putra/i Papua/ Papua Barat
23.	TERAMPIL - PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	D-III SEMUA JURUSAN	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG KOORDINASI DAN SUPERVISI, SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI DAN SUPERVISI	26	0	0
24.	TERAMPIL - PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	D-III SEMUA JURUSAN	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA, SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN DATA	3	0	0
25.	TERAMPIL - PRANATA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	D-III SEMUA JURUSAN	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, PUSAT PERENCANAAN STRATEGIS PEMBERANTASAN KORUPSI	3	0	0
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>191</b>	<b>21</b>	<b>2</b>

Tabel Komposisi Unit Penempatan sesuai dengan formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> atau <https://rekutmen.kpk.go.id/cpns>

### III. KRITERIA PELAMAR

**1. Formasi Umum** merupakan pelamar lulusan Perguruan Tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini.

**2. Formasi Khusus** terdiri dari:

**a. Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude***

1) Pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat kelulusan "**Dengan Pujian**"/*Cumlaude* dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

- 2) Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara **“Dengan Pujian”/Cumlaude** dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

#### **b. Putra/Putri Papua dan Papua Barat**

Putra/Putri Papua dan Papua Barat merupakan pelamar keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.

#### **IV. PERSYARATAN PENDAFTARAN**

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Perwakilan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia di Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
10. Pelamar formasi **“Dengan Pujian”/Cumlaude** Lulusan Dalam Negeri merupakan lulusan perguruan tinggi yang memiliki sertifikat akreditasi BAN-PT yang menyatakan bahwa program studi pelamar pada saat lulus terakreditasi dengan predikat A atau Unggul dan memiliki sertifikat akreditasi BAN-PT yang menyatakan bahwa perguruan tinggi pelamar pada saat lulus terakreditasi dengan peringkat A atau Unggul;
11. Pelamar formasi **“Dengan Pujian”/Cumlaude** Lulusan Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara **“Dengan Pujian”/Cumlaude** dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
12. Tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dengan pejabat/pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
13. Tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dengan tersangka/terdakwa/terpidana Tindak Pidana Korupsi;
14. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (sesuai transkrip nilai):
  - Minimal 3.00 untuk Sarjana (S1);
  - Minimal 3.00 untuk Diploma III (D-III).

## V. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan secara *online* mulai tanggal **17 September s.d. 6 Oktober 2023** dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pelamar Membuat akun pada Portal <https://sscasn.bkn.go.id/>;
2. Pelamar Log in ke <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
3. Pelamar mengunggah swafoto (foto selfie) dengan memperlihatkan KTP dan Kartu Informasi Akun untuk dapat melanjutkan ke tahap berikutnya;
4. Pelamar melengkapi data diri pada kolom yang disediakan.
5. Pelamar memilih instansi Komisi Pemberantasan Korupsi dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, kemudian pelamar memilih pendidikan sesuai ijazah, jabatan dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
6. Pelamar mengunggah *soft file* berkas berjenis PDF File, sebagai berikut:
  - a) *Scan asli* KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP;
  - b) *Scan asli* Ijazah. Bagi pelamar Lulusan Luar Negeri ditambahkan *scan* penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
  - c) *Scan asli* Transkrip Nilai;
  - d) *Scan asli* Surat Lamaran bermeterai;
  - e) *Scan asli* Surat Pernyataan 10 (sepuluh) poin bermeterai;
  - f) *Scan asli* Surat Pernyataan bermeterai bersedia ditempatkan di seluruh unit kerja di lingkungan instansi Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - g) *Scan asli* Surat Pernyataan bermeterai tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dengan pejabat/pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi serta tidak terikat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ke-3 (tiga) dengan tersangka/terdakwa/terpidana Tindak Pidana Korupsi;
  - h) Dokumen tambahan bagi pelamar formasi khusus, ditambahkan *scan* dokumen pendukung lainnya sebagai berikut:
    - Akta Kelahiran/surat keterangan lahir pelamar dan surat keterangan dari kepala desa/suku, untuk pelamar **Putra/i Papua/Papua Barat**;
    - Sertifikat Akreditasi BAN-PT yang menyatakan bahwa program studi pelamar pada saat lulus terakreditasi dengan peringkat A atau Unggul dan Sertifikat Akreditasi BAN-PT yang menyatakan bahwa perguruan tinggi pelamar pada saat lulus terakreditasi dengan peringkat A atau Unggul, untuk pelamar **“Dengan Pujian”/Cumlaude** Lulusan Dalam Negeri;
  - i) Pelamar menyimpan data yang telah terisi dengan lengkap dan benar. Data yang telah dikirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun.
7. Pelamar mengunggah pasfoto terbaru dengan pakaian formal dan berlatar belakang merah;
8. Pelamar mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2023 yang merupakan bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran melalui SSCASN 2023.

## VI. SELEKSI DAN PELAKSANAAN TES TAHAP I (Seleksi Administrasi)

- 1) Calon Peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta yang datanya memiliki kesesuaian antara data yang diinput dalam aplikasi pendaftaran *online* dengan berkas yang di-*upload* dan sesuai dengan persyaratan pendaftaran yaitu:
  - a) Nama Lengkap (sesuai dengan *scan* ijazah);
  - b) Tanggal Lahir (sesuai dengan *scan* ijazah) dan pada saat melamar berusia:
    - Minimal 18 tahun dan maksimal 35 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk Sarjana (S1);

- Minimal 18 tahun dan maksimal 35 Tahun 0 Bulan 0 Hari untuk Diploma III Umum (D-III);
  - c) Tingkat Pendidikan (sesuai dengan *scan* ijazah);
  - d) Program Studi (sesuai dengan *scan* ijazah);
  - e) Indeks Prestasi Kumulatif (sesuai *scan* transkrip nilai):
    - Minimal 3.00 untuk Sarjana (S1);
    - Minimal 3.00 untuk Diploma III (D-III).
  - f) Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi terakreditasi, untuk pelamar formasi umum, formasi khusus **putra/i Papua/Papua Barat** (sesuai ijazah/transkrip);
  - g) Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul untuk Pelamar Formasi khusus **“Dengan Pujian”/Cumlaude** Lulusan Dalam Negeri (sesuai Sertifikat Akreditasi BANPT);
  - h) Surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk pelamar formasi khusus **“Dengan Pujian”/Cumlaude** Lulusan Luar Negeri (sesuai Surat Keterangan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi);
  - i) Pelamar merupakan Keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak/Ibu) asli Papua/Papua Barat untuk pelamar formasi khusus **putra/i Papua/Papua Barat** (sesuai Akta kelahiran/Surat Keterangan Lahir dan Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku);
- 2) Calon Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi adalah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns>. Selanjutnya peserta dapat mencetak Tanda Peserta Ujian CPNS (TPU).

## VII. SELEKSI DAN PELAKSANAAN TES TAHAP II (Seleksi Kompetensi Dasar/SKD)

- a. SKD berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) dilaksanakan secara bersama oleh Tim Kerja SKD bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara;
- b. SKD terdiri dari:
  - 1) TKP (Tes Karakteristik Pribadi)  
Dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan yang meliputi: pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme;
  - 2) TIU (Tes Intelegensia Umum)  
Dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan pelamar dalam mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, serta kemampuan figural;
  - 3) TWK (Tes Wawasan Kebangsaan)  
Dimaksudkan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan pelamar mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara.
- c. Peserta yang dinyatakan lulus adalah:
  - 1) Peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas/Passing Grade sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 651 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023;
  - 2) Memenuhi batas peringkat yaitu sejumlah 3x formasi untuk setiap jabatan.

## VIII. SELEKSI DAN PELAKSANAAN TES TAHAP III (Seleksi Kompetensi Bidang Non CAT dan CAT)

Sifat Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Non CAT dan CAT adalah skoring;

- 1) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Non CAT (50%)
  - a) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Non CAT terdiri dari 3 macam Tes yaitu: Tes Potensi dan Asesmen Kompetensi dengan komputer, Tes Wawancara unit kerja serta Tes Kesehatan;
  - b) Nilai SKB Non CAT dihitung dengan pembobotan: Tes Potensi dan asesmen kompetensi dengan komputer 15%, Tes Wawancara unit kerja 25%, serta Tes Kesehatan 10%;
  - c) Tes Potensi dan asesmen kompetensi dengan komputer
    1. Tes Potensi dan asesmen kompetensi dengan komputer dilaksanakan oleh Tim Kerja Rekrutmen–bersama dengan lembaga penyelenggara penilaian kompetensi selain instansi pemerintah pemenang lelang;
    2. Aspek yang diukur untuk Tes Potensi yaitu:
      - Kapabilitas Berpikir, terdiri atas sub aspek: kemampuan intelektual, kemampuan berpikir kritis & strategis serta kemampuan menyelesaikan masalah;
      - Motivasi, terdiri atas sub aspek motivasi, komitmen serta kemampuan belajar cepat & mengembangkan diri;
      - Karakter, terdiri atas kemampuan interpersonal, kecerdasan emosional dan kesadaran diri (*self awareness*).
    3. Aspek yang diukur untuk Asesmen Kompetensi yaitu:
      - Manajerial, terdiri atas sub aspek Integritas, Kerjasama, Komunikasi, Orientasi pada Hasil, Pelayanan Publik, Pengembangan Diri dan Orang Lain, Mengelola Perubahan dan Pengambilan Keputusan.
      - Sosial kultural terdiri atas sub aspek Perekat Bangsa.
    4. Nilai Hasil Tes Potensi dan Asesmen Kompetensi:

Gol	Formasi Umum	Formasi Khusus	
		“Dengan Pujian”/ <i>Cumlaude</i>	Putra/i Papua/Papua Barat
II	<p><b>Tes Potensi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disarankan: <math>\geq 100\%</math></li> <li>- Masih Dapat Disarankan dengan Catatan Pengembangan: 85% - 99%</li> <li>- Tidak Dapat Disarankan: <math>&lt; 85\%</math></li> </ul> <p><b>Asesmen Kompetensi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi Syarat (MS): <math>\geq 80\%</math></li> <li>- Masih Memenuhi Syarat (MMS): 68% - 79%</li> <li>- Kurang Memenuhi Syarat (KMS): <math>\leq 67\%</math></li> </ul>	<p><b>Tes Potensi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disarankan: <math>\geq 100\%</math></li> <li>- Masih Dapat Disarankan dengan Catatan Pengembangan: 85% - 99%</li> <li>- Tidak Dapat Disarankan: <math>&lt; 85\%</math></li> </ul> <p><b>Asesmen Kompetensi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memenuhi Syarat (MS): <math>\geq 80\%</math></li> <li>- Masih Memenuhi Syarat (MMS): 68% - 79%</li> <li>- Kurang Memenuhi Syarat (KMS): <math>\leq 67\%</math></li> </ul>	
III	<p><b>Tes Potensi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disarankan: <math>\geq 100\%</math></li> <li>- Masih Dapat Disarankan dengan Catatan Pengembangan: 85% - 99%</li> </ul>	<p><b>Tes Potensi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disarankan: <math>\geq 100\%</math></li> <li>- Masih Dapat Disarankan dengan Catatan Pengembangan: 85% - 99%</li> </ul>	



Gol	Formasi Umum	Formasi Khusus	
		“Dengan Pujian”/ <i>Cumlaude</i>	Putra/i Papua/Papua Barat
	- Tidak Dapat Disarankan: < 85% <b>Asesmen Kompetensi:</b> - Memenuhi Syarat (MS): ≥ 80 % - Masih Memenuhi Syarat (MMS): 68 % - 79 % - Kurang Memenuhi Syarat (KMS): ≤ 67 %	- Tidak Dapat Disarankan: < 85% <b>Asesmen Kompetensi:</b> - Memenuhi Syarat (MS): ≥ 80 % - Masih Memenuhi Syarat (MMS): 68 % - 79 % - Kurang Memenuhi Syarat (KMS): ≤ 67 %	

d) Tes Wawancara Unit Kerja untuk mengukur kompetensi teknis dengan Standar Kompetensi Jabatan Menggunakan pendekatan *Competency-Based Selection Interview*;

e) Tes Kesehatan

1. Tes Kesehatan terdiri dari pemeriksaan laboratorium (darah lengkap), pemeriksaan fisik, dan deteksi narkoba;
2. Tes Kesehatan dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara Tes Kesehatan selain Instansi Pemerintah.
3. Kriteria pelaksanaan Tes Kesehatan mengacu pada ketentuan/ pedoman yang berlaku di Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Tes Kesehatan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi terhadap kondisi kesehatan, kemungkinan ditemukannya penyakit/kelainan yang akan mempengaruhi rekomendasi terhadap peserta.
5. Tes kesehatan mencakup beberapa objek pemeriksaan, diantaranya Tinggi Badan, Berat Badan, Tekanan Darah, Fisik, Telinga Hidung Tenggorokan (THT), Mata, Laboratorium, Elektrokardiogram (EKG), dan deteksi narkoba;
6. Kategori hasil Tes kesehatan yaitu:
  - Kategori I (Nilai 100)  
Bila hasil Tes Kesehatan menunjukkan kondisi semua organ tubuh yang diperiksa dalam batas normal menurut ilmu kedokteran atau bila kondisi sehat, tetapi hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal yang kurang Optimal;
  - Kategori II (Nilai 0)  
Bila hasil Tes Kesehatan menunjukkan adanya suatu penyakit atau kelainan pada organ tubuh peserta tes yang sulit atau tidak dapat disembuhkan.

2) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CAT (50%)

SKB merupakan Tes Kompetensi Teknis (TKT) menggunakan sistem CAT.

## IX. MASA SANGGAH

Pelamar diberikan kesempatan untuk menyampaikan sanggahan apabila dianggap terdapat kesalahan pada Seleksi Administrasi, SKD, atau SKB dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Masa Sanggah dibuka sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- b. Pelamar menyanggah dengan alasan yang jelas disertai menunjukkan bukti yang kuat melalui akun masing-masing dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- c. Sanggahan pelamar yang disetujui oleh Tim Kerja akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://rekutmen.kpk.go.id/cpns>.

## X. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Administrasi menggunakan sistem gugur, didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang diunggah (*upload*) dibandingkan dengan data yang diinput sesuai dengan persyaratan pendaftaran;
2. Pelamar yang sanggahan terhadap hasil Seleksi Administrasi, SKD, atau SKB-nya diterima, status kelulusannya pada tahap Seleksi Administrasi, SKD, atau SKB dapat berubah dari "Tidak Lulus Seleksi Administrasi, SKD, atau SKB" menjadi "Lulus Seleksi Administrasi, SKD, atau SKB", begitupun sebaliknya;
3. Kelulusan SKD didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 651 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2023;
4. Terhadap pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti setiap tahapan seleksi pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
5. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan pemeringkatan sesuai jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan dari hasil integrasi SKD dan SKB dengan bobot penilaian hasil SKD 40% dan SKB 60% (Non CAT 50% dan CAT 50%) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

## XI. JADWAL PELAKSANAAN

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	16 s.d. 30 September 2023
2	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d. 6 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	17 September s.d. 9 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d. 13 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	14 s.d. 16 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	14 s.d. 18 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d. 23 Oktober 2023
8	Penarikan Data Final	24 s.d. 26 Oktober 2023
9	Penjadwalan SKD CPNS	27 s.d. 30 Oktober 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	31 Oktober s.d. 3 November 2023
11	Pelaksanaan SKD CPNS	4 s.d. 13 November 2023
12	Pengolahan Nilai SKD CPNS	11 s.d. 14 November 2023
13	Pengumuman Hasil SKD CPNS	15 s.d. 17 November 2023
14	Masa Sanggah	18 s.d. 20 November 2023
15	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 November 2023
16	Pengolahan Nilai SKD CPNS Hasil Sanggah	21 s.d. 25 November 2023
17	Pengumuman Pasca Sanggah	22 s.d. 27 November 2023
18	Pelaksanaan SKB CPNS non CAT	28 November s.d. 17 Desember 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	TANGGAL
19	Pemetaan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT (Input Lokasi SKB)	28 s.d. 30 November 2023
20	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	1 s.d. 3 Desember 2023
21	Penarikan Data Final	4 s.d. 5 Desember 2023
22	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	6 s.d. 7 Desember 2023
23	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	8 s.d. 10 Desember 2023
24	Pelaksanaan SKB CPNS dengan CAT	11 s.d. 17 Desember 2023
25	Integrasi Nilai SKB dan SKD	18 s.d. 30 Desember 2023
26	Pengumuman Kelulusan	31 Desember 2023 s.d. 7 Januari 2024
27	Masa Sanggah	8 s.d. 10 Januari 2024
28	Jawab Sanggah	8 s.d. 14 Januari 2024
29	Pengolahan Nilai Seleksi Hasil Sanggah	10 s.d. 15 Januari 2024
30	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	11 s.d. 17 Januari 2024
31	Pengisian DRH NIP CPNS	18 Januari s.d. 16 Februari 2024
32	Usul Penetapan NIP CPNS	17 Februari s.d. 17 Maret 2024

Catatan: Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

## XII. LAIN – LAIN

1. Pelamar CPNS 2023 yang telah lulus seleksi dan sudah ditetapkan NIP oleh BKN, kemudian mengundurkan diri, tidak dapat mendaftar pada Rekrutmen CPNS Komisi Pemberantasan Korupsi tahun berikutnya;
2. Dalam rangka Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini tidak ada bimbingan tes atau persiapan pendahuluan dan tidak diadakan surat menyurat;
3. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
4. Transportasi dan akomodasi pelamar selama pelaksanaan seleksi ditanggung oleh pelamar;
5. Pengumuman setiap tahapan tes ditayangkan secara *online* pada portal <https://sscasn.bkn.go.id/> serta dapat dilihat pada atau <https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns;>
6. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan tes ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemberantasan Korupsi dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah **penipuan** dan agar dilaporkan melalui website <https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns> Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
7. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemberantasan Korupsi, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan

melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;

8. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun Anggaran 2023 dapat menghubungi melalui:
  - a. E-mail : [Panitia.Reksel@kpk.go.id](mailto:Panitia.Reksel@kpk.go.id)
  - b. *Whatsapp* : 0813-1555-8854 (pada hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB)
9. Keputusan Panitia dalam hal kelulusan pendaftar/pelamar pada setiap tahapan tes bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
10. Informasi lebih lanjut mengenai Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ini dapat dilihat melalui portal Komisi Pemberantasan Korupsi <https://www.kpk.go.id/> dan <https://rekrutmen.kpk.go.id/cpns>.

Jakarta, 13 September 2023

Sekretaris Jenderal  
selaku Ketua



Cahaya H. Harefa

NIP. 197005112021061001